

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Melalui Optimalisasi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Herry Widystono
Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Menengah,
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendiknas
email: herrywidystono@yahoo.com

Abstrak: Berbagai hasil penelitian menunjukkan terdapat kecenderungan semakin merosotnya nilai-nilai moral dan karakter para remaja. Bahkan, tidak di kalangan remaja saja, secara umum bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai problem kebangsaan yang tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia, seperti budaya korup, lebih menyukai jalan pintas, intoleran, kekerasan, ketidakpercayaan kepada pihak lain (*distrust*). Penyelenggaraan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan karakter tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nilai-nilai karakter sudah termuat dalam Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang merupakan acuan dalam menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Implementasi pendidikan karakter mengacu pada prinsip-prinsip: a) berkelanjutan; b) diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran yang sudah ada, muatan lokal, pengembangan diri, dan budaya sekolah, dan c) nilai-nilai karakter tidak diajarkan tapi dikembangkan dan dilaksanakan, serta d) pembelajaran dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.

Kata kunci: *pendidikan, karakter, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan.*

Abstract: A huge number of research findings indicate that there is an obvious moral degradation within youngsters. This is one of the problems encountered by Indonesia. Corruption, intolerance, distrust, violence to other people, and so on and so forth are also other serious problems. Accordingly, the implant of a character building to learners constitutes a compulsory because this will not only result in smart students, but also make them to have good character as well as to be polite. By having such characters they will be useful for themselves of their lives and other people in community as well. The predetermined characters have already been included in the "graduate competence standard" and "content standard" for basic and secondary education and these are as reference to enact school-based curriculum. There are some principles of conveying the values to students at primary, junior and senior secondary schools, among other things (a) sustainability, (b) be integrated to all existing subject matters, local content, self-development, and the habitual acts in schools, (3) the values are not taught in isolation, but be developed and be implemented involving students to be active and enjoyable.

Keywords: *education, character, graduate competence standard, content standard, and school-based curriculum.*

Pendahuluan

Dalam situs Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2008) terungkap hasil survei tahun 2008 yang mengejutkan sehingga rasanya sulit dipercaya. Sebanyak 63% persen remaja di Indonesia usia SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, 21% di antaranya melakukan aborsi. Persentase rema-

ja yang melakukan hubungan seksual pranikah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasar data penelitian pada tahun 2005-2006 di kota-kota besar mulai Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makasar, masih berkisar 47,54% remaja yang melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Selanjutnya, hasil penelitian di Yogyakarta tahun 2010 (BKKBN, 2010), dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37% mengalami kehamilan sebelum menikah. Selain itu, data tentang penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa dari 3,2 juta jiwa yang ketagihan narkoba, 78% adalah remaja.

Meskipun demikian, masih ada pelajar yang patut dibanggakan, yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, seperti mereka yang telah menjuarai olimpiade sains, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, pelajar Indonesia menjadi juara umum dalam *International Conference of Young Scientists (ICYS)* atau Konferensi Internasional Ilmuwan Muda se-Dunia yang diikuti ratusan pelajar SMA dari 19 negara di Bali pada tanggal 12 – 17 April 2010.

Berita di atas hanyalah sebagian dari fenomena gunung es merosotnya nilai-nilai moral dan karakter para remaja kita. Tawuran pelajar, maraknya peredaran narkoba di kalangan siswa, adanya siswa yang terlibat dalam tindakan kriminal, dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya, merupakan keprihatinan kita bersama. Siapa yang tidak prihatin melihat pelajar yang tidak punya sopan santun, minum minuman keras, mabok-mabokan, dan hobi kebut-kebutan mengendarai motor di jalan raya, mencuri, berjudi?

Bahkan, tidak di kalangan remaja saja, secara umum bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai problem kebangsaan yang serius, seperti budaya korup, lebih menyukai jalan pintas, intoleran, kekerasan, *distrust* (ketidakpercayaan kepada pihak lain), dan masih banyak lagi.

Distrust ini nampak dalam pelaksanaan Ujian Nasional, yang terpaksa dilakukan melalui prosedur dan proses yang sangat *ribet*, mulai dari pengawasan silang, pemantauan oleh pemantau independen, sampai pengawalan distribusi soal yang meliatkan aparat kepolisian. Hal ini mungkin hanya terjadi di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Andaikan bangsa ini tidak sedang dilanda *distrust* tentu pelaksanaan Ujian Nasional cukup diserahkan kepada pihak sekolah penyelenggara, tidak perlu melibatkan berbagai pihak, sehingga bisa lebih efisien biaya penyelenggarannya.

Andaikan semua elemen bangsa ini masih menjadikan kejujuran sebagai spirit dan etika dalam menjalankan tugas dan peranannya masing-masing, niscaya tidak perlu lagi dibentuk

berbagai lembaga pengawasan yang berlapis-lapis, seperti BPK, BPKP, KPK, Bawasda, dan lembaga lainnya (Abdul Munip, 2009, Reinventing Nilai-nilai Islam Mengenai Peranan Guru dalam Pendidikan Karakter. <http://www.scribd.com/doc/12991475/Guru> Dalam Pendidikan Karakter. Diunduh 30/1/2011).

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala di atas, dan terdapat banyak faktor pula yang dapat menekan atau meminimalisirnya, satu di antaranya adalah penyelenggaraan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain (Mendiknas, 2010).

Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah tidak merupakan mata pelajaran khusus yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah ada. Karena seharusnya KTSP sudah mengandung muatan nilai-nilai karakter, namun sayangnya selama ini tidak diimplementasikan secara optimal.

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji di sini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan karakter melalui optimalisasi pelaksanaan KTSP?"

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum penyelenggaraan pendidikan karakter melalui optimalisasi pelaksanaan KTSP sehingga dapat digunakan sebagai referensi para pembaca terutama para guru dan kepala sekolah ketika menyelenggarakan pendidikan karakter di sekolah masing-masing.

Kajian Literatur dan Pembahasan

Pendidikan Karakter

Belakangan ini santer dibicarakan lagi tentang Pendidikan Karakter. Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun ajaran 2010/2011 telah melakukan Rintisan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada 125 satuan pendidikan yang tersebar di 16 kabupaten/kota pada 16 Propinsi

di Indonesia (Pusat Kurikulum, 2010b). Rencananya, mulai tahun ajaran 2011 semua satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mulai melaksanakan Pendidikan Karakter. Istilah karakter, seringkali diidentikkan dengan berbagai istilah, seperti akhlak, budi pekerti, moral, etika, dan lainnya.

Pemahaman tentang Pendidikan Karakter merupakan hal yang sangat fundamental bagi kehidupan bangsa. Pada masa Orde Lama, untuk membantu pembentukan karakter bangsa maka Pendidikan Budi Pekerti menjadi salah satu pelajaran dalam Kurikulum SD 1947. Kemudian pada Kurikulum 1964, Pendidikan Budi Pekerti digabung dengan Pendidikan Agama dengan nama Agama/Budi Pekerti; juga ada mata pelajaran khusus tentang kewarganegaraan yang disebut Civics (Soeparto, dkk., 1962, dalam Koesoema, 2010).

Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara coba dibudayakan dengan lebih sistematis lagi dengan cara mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dikenal dengan istilah P4 (Rom, Darjanto dan D. Mulyadi, 1969, dalam Koesoema, 2010), dan diadakannya mata pelajaran khusus yaitu Kewarganegaraan Negara Indonesia (Dedi Supriadi, 2001, dalam Koesoema, 2010), Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Selanjutnya, pada saat ini Pendidikan Karakter akan diintegrasikan ke dalam semua Mata Pelajaran yang sudah ada karena dalam SKL dan SI yang merupakan acuan utama dalam penyusunan KTSP sudah terkandung nilai-nilai karakter, tinggal diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, juga akan dilaksanakan melalui Pengembangan Diri, dan Budaya Sekolah (Pusat Kurikulum, 2010a), serta Muatan Lokal (Widyastono, 2010).

Pendidikan Karakter memang timbul tenggelam dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Adakalanya menjadi primadona, diujudkan dalam mata pelajaran khusus, ada kalanya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Agama, Pendidikan Moral Panasila, Pendidikan Akhlak Mulia, dan/atau Pendidikan Kewarganegaraan, namun adakalanya

Pendidikan Karakter tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diajarkan dan dilaksanakan.

Saat ini penyelenggaraan Pendidikan Karakter merupakan amanah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pemikiran pendidikan karakter tetap bergulir dalam sejarah pendidikan bangsa Indonesia. Situasi ini menyadarkan kita untuk kembali dapat memahami, meletakkan, dan melaksanakan Pendidikan Karakter bagi pembentukan kepribadian bangsa.

Suyanto (2010) mendefinisikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuat. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*), tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dijelaskan lebih lanjut bahwa beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis.

Pendidikan karakter oleh Pusat Kurikulum (2010a) dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bersumber dari: 1) Agama, 2) Pancasila, 3) Budaya, dan 4) Tujuan Pendidikan Nasional (Pusat Kurikulum, 2010a). Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada

nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter sebagai berikut (Pusat Kurikulum, 2010a).

Sekolah bebas untuk memprioritaskan nilai-nilai mana dulu yang hendak dibangun dalam diri siswa. Bahkan Pemerintah mendorong munculnya keragaman untuk pelaksanaan pendidikan karakter (Fasli Jalal, 2010). Di sekolah A dapat saja memprioritaskan nilai-nilai kejujuran, sekolah B memprioritaskan nilai-nilai religius, sekolah C

memprioritaskan nilai-nilai toleransi, sedangkan di sekolah D memprioritaskan sekaligus nilai-nilai religius, kejujuran, toleransi, dan kedisiplinan. Namun, sebaiknya untuk menerapkan pendidikan karakter, seluruh warga sekolah harus memiliki kesepakatan tentang nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan di sekolahnya (Anita Lie, 2010). Bila nilai-nilai karakter yang sudah disepakati untuk diimplementasikan maka selanjutnya ditambah dengan nilai-nilai karakter yang lain, demikian seterusnya, sampai pada suatu saat semua nilai-nilai karakter diimplementasikan di sekolah dan di luar sekolah.

Muatan Karakter dalam Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengauran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) serta berpedoman pada Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP (BSNP, 2006). SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter

No.	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah Air	Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya.
16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

tertentu. Termasuk dalam SKL adalah SKL Satuan Pendidikan, SKL Kelompok Mata Pelajaran, SKL Mata Pelajaran, sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006. SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006. Dengan demikian, alurnya dapat digambaran secara diagramatis seperti di bawah ini.



Diagram 1. Alur Acuan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan meliputi: 1) SD/MI/SDLB/Paket A; 2) SMP/MTs/SMPLB/Paket B; 3) SMA/MA/SMALB/ Paket C; 4) SMK/MAK. Sebagai contoh, dikemukakan salah satu di antara 4 SKL Satuan Pendidikan tersebut, yaitu SKL SMA/MA/SMALB bagi siswa yang memiliki inteligensi relatif normal, yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras. Paket C meliputi: 1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan

remaja; 2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya; 3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya; 4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial; 5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global; 6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif; 7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan; 8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri; 9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik; 10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks; 11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial; 12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab; 13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 14) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya; 15) Mengapresiasi karya seni dan budaya; 16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok; 17) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan; 18) Berkommunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun; 19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat; 20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain; 21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis; 22) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris; dan 23) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua SKL SMA/MA/SMALB¹/Paket C mengadung muatan nilai-nilai karakter sebagaimana deskripsi nilai-nilai karakter dalam Tabel 1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter.

Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran meliputi: 1) Agama dan Akhlak Mulia; 2)

Kewarganegaraan dan Kepribadian; 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Estetika; dan 5) Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.

Sebagai contoh, dikemukakan salah satu di antara 4 SKL Kelompok Mata Pelajaran, yaitu SKL Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

SKL Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian SMA/MA/SMALB² SMALB bagi siswa yang memiliki inteligensi relatif normal, yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras. Paket C: 1) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasya-rakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, hukum, dan perundangan; 3) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan global; 4) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab; 5) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya; 6) Berkommunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi; 7) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya; 8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri; 9) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis; 10) Berkarya secara kreatif, baik individual maupun kelompok; 11) Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani; 12) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk meningkatkan ketaqwaan dan memperkuat kepribadian; 13) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat; 14) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain; dan 15) Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika.

Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua SKL Kelompok Mata Pelajaran

Kewarganegaraan dan Kepribadian SMA/MA/SMALB. Paket C mengadung muatan nilai-nilai karakter sebagaimana deskripsi nilai-nilai karakter dalam Tabel 1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter.

Selanjutnya, SKL Kelompok Mata Pelajaran dijabarkan menjadi SKL Mata Pelajaran. Terdapat sejumlah mata pelajaran di setiap satuan pendidikan, salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. SKL Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA, peserta didik memiliki kemampuan: 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua SKL Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian SMA mengadung muatan nilai-nilai karakter sebagaimana deskripsi nilai-nilai karakter dalam Tabel 1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter.

SKL Mata Pelajaran, selanjutnya dijabarkan menjadi sejumlah Standar Kompetensi (SK); dan masing-masing SK dijabarkan lebih lanjut menjadi sejumlah Kompetensi Dasar (KD). Sebagai contoh, di bawah ini adalah SK dan KD mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas X Semester 1.

Berdasar tabel 2, dapat disimpulkan bahwa semua SK dan KD Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMA mengadung muatan nilai-nilai karakter sebagaimana deskripsi nilai-nilai karakter dalam Tabel 1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter, namun sayangnya sebagian besar sekolah belum mengimplementasikannya. Oleh karena hal ini merupakan amanah dari peraturan perundangan, dan penyusunan KTSP harus mengacu pada SKL Satuan Pendidikan, SKL Kelompok Mata Pelajaran, SKL Mata Pelajaran, SK

Tabel 2 SK dan KD mata pelajaran PKn kelas X Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional	2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional 2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan 2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM 3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia 3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

dan KD Mata Pelajaran, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengimplementasikan pendidikan karakter di setiap sekolah.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter (Pusat Kurikulum, 2010a): 1) Berkelanjutan; mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses yang tiada berhenti, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan, bahkan setelah tamat dan terjun ke masyarakat; 2) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah, serta (Widyastono, 2010) muatan lokal; mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, serta dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler; 3) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan dan dilaksanakan; mengandung makna bahwa materi nilai

karakter tidak dijadikan pokok bahasan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, dan ketrampilan, ataupun mata pelajaran lainnya. Guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa. Juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor; 4) Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerap-

kan prinsip "tut wuri handayani" dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasar masalah serta kajian literatur dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan simpulan berikut: 1) Bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai problem kebangsaan yang tidak mencerminkan budaya dan karakter bangsa, seperti budaya korup, lebih menyukai jalan pintas, intoleran, kekerasan, ketidakpercayaan kepada pihak lain, serta kecenderungan semakin merosotnya nilai-nilai moral dan karakter para remaja; 2) Penyelenggaraan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan karakter tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain; 3) SKL Satuan Pendidikan, SKL Kelompok Mata Pelajaran, SKL Mata Pelajaran, SK Mata Pelajaran, dan KD Mata Pelajaran, yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, semuanya sudah mengandung muatan nilai-nilai karakter, namun sayangnya

sebagian besar sekolah belum mengimplementasikannya dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, dan 4) Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah yaitu: (a) berkelanjutan, (b) diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran yang sudah ada, muatan lokal, pengembangan diri, dan budaya sekolah, (c) nilai-nilai karakter tidak diajarkan tapi dikembangkan dan dilaksanakan, serta (d) pembelajaran dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.

Saran

Berdasar simpulan di atas, dapat dirumuskan saran-saran di bawah ini: 1) Penyusunan KTSP harus mengacu pada SKL satuan Pendidikan, SKL kelompok mata pelajaran, SKL mata pelajaran, SK Mata pelajaran, dan KD mata pelajaran, kemudian tidak hanya digunakan sebagai kelengkapan dokumen sekolah melainkan harus diimplementasikan dalam setiap kegiatan sekolah; 2) Pembelajaran di sekolah hendaknya tidak hanya menekankan pada aspek-aspek kognitif saja, melainkan juga harus menekankan pada aspek-aspek afektif dan psikomotorik yang merupakan unsur utama pendidikan karakter; 3) Agar implementasi pendidikan karakter dapat lebih efektif, maka kelulusan siswa hendaknya tidak hanya ditentukan oleh penilaian aspek kognitif saja, melainkan juga penilaian afektif dan psikomotor.

Pustaka Acuan

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2010. 63 Persen Remaja Berhubungan Seks di Luar Nikah. <http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia pii/arsip/63-persen-remaja-berhubungan-seks-di-luar-nikah>. Diunduh 30 Januari2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Jalal, Fasli. 2010. Pendidikan Karakter Diintegrasikan, *Kompas.com, Minggu, 31 Agustus, 2010*. Diunduh 30 Januari 2011.
- Koesoema A., Doni. 2010. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Lie, Anita. 2010. Guru Belum Terapkan Pendidikan Karakter. <http://buntetpesantren.org/index, 16 Januari 2010>. Diunduh 31 Januari 2011.
- Menteri Pendidikan Nasional. 2010. Penerapan Pendidikan Karakter Dimulai di SD. <http://www.antaranews.com/berita/1273933824/mendiknas, Sabtu, 15 Mei 2010>. Diunduh 30 Januari 2011.
- Munip, Abdul. 2009, Reinventing Nilai-nilai Islam Mengenai Peranan Guru dalam Pendidikan Karakter. <http://www.scribd.com/doc/12991475/ Guru Dalam Pendidikan Karakter>. Diunduh 30/1/2011.
- Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional. 2010a. Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional. 2010b. Laporan Supervisi 125 Sekolah Piloting Penyelenggaraan Pendidikan Karakter. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Suyanto. 2010. Urgensi Pendidikan Karakter. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas.
- Widyastono, Herry. 2010. Bahan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Sekolah. Jakarta: Yayasan Pendidikan Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman.
- Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945